



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

ERP Sebaiknya Berbasis Kawasan

JAKARTA, KOMPAS — Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta saat ini tengah menyiapkan payung hukum penerapan jalan berbayar elektronik atau *electronic road pricing*. Pada tahap awal, jalan berbayar akan diterapkan di 25 ruas jalan. Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah DKI Jakarta memberi masukan sebaiknya jalan berbayar elektronik diterapkan di kawasan, bukan berbasis jalan.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MT) wilayah DKI Jakarta Yusa C Permana, Kamis (19/1/2023), menjelaskan, jalan berbayar elektronik (JBE) atau *electronic road pricing* (ERP) mesti dipahami sebagai bagian dari strategi manajemen transportasi perkotaan.

Sebagai bagian dari strategi besar dan utuh manajemen transportasi wilayah perkotaan, penerapan ERP bertujuan untuk mendorong penggunaan angkutan umum, serta mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, memberikan opsi sumber pendanaan pembiayaan angkutan umum, serta mendorong keberlanjutan pengelolaan transportasi perkotaan, baik secara ekonomi, lingkungan, teknis, sosial, maupun budaya.

Untuk itu, Yusa berpandangan, kebijakan ERP sebaiknya diterapkan di kawasan yang dilayani angkutan umum massal, bukan di koridor jalan. "Secara ideal ERP sepatutnya diterapkan melingkupi sebuah kawasan dan bukan berupa koridor jalan," ujarnya.

Apabila ERP diterapkan pada koridor jalan, kebijakan itu berpotensi melimpahkan beban lalu lintas ke koridor jalan lain yang bersifat alternatif akses untuk asal dan tujuan pergerakan lalu lintas yang sama. Untuk itu, penerapan ERP berbasis koridor jalan harus dikombinasikan dengan strategi manajemen kebutuhan transportasi lainnya.

Yusa mengatakan, strategi

Secara ideal ERP sepatutnya diterapkan melingkupi sebuah kawasan dan bukan berupa koridor jalan.

Yusa C Permana

lain itu, misalnya, kombinasi dengan *intelligent traffic control system* (ITCS) untuk koridor tanpa angkutan massal agar mampu mengurai beban lalu lintas yang terlimpahkan dari koridor ERP. Bersamaan dengan itu, dilakukannya pula implementasi ETLE di koridor luar ERP untuk memastikan kedisiplinan lalu lintas.

"Penerapan ERP berbasis koridor sepatutnya diposisikan sebagai bagian langkah awal menuju penerapan berbasis kawasan untuk menghindari pelimpahan volume lalu lintas," kata Yusa.

Tunggu payung hukum

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memaparkan, untuk bisa menerapkan kebijakan ERP, diperlukan proses pembahasan dan penyiapan.

"Sekarang masih dalam proses di DPRD untuk pembahasan raperda," kata Heru Budi, Rabu (11/1). Menurut dia, untuk bisa menerapkan kebijakan ERP, diperlukan regulasi atau landasan hukum.

Setelah terbit peraturan daerah tentang ERP, masih akan diikuti pembahasan untuk diterbitkan aturan turunan. Aturan itu bisa berbentuk peraturan gubernur, bisa juga berbentuk keputusan gubernur.

Tahapan berikutnya adalah pembahasan untuk proses bisnis. Proses bisnis itu di antaranya membahas badan usaha pengelola ERP yang juga dibahas dengan DPRD. Kemudian, penetapan titik penerapan ERP.

"Berikutnya adalah tarif. Tarif masih perlu pembahas-

an dengan (pemerintah) pusat," kata Heru Budi sembari menambahkan total ada tujuh tahapan. Pembahasan dimulai tahun lalu dan dilanjutkan mungkin tahun ini.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, terkait munculnya anggapan bahwa ERP hanya memindahkan kemacetan, menurut dia, tidak demikian. Adanya ERP berarti masyarakat memiliki pilihan.

Pilihannya adalah mereka bermobilitas lebih efisien dengan angkutan umum atau harus mengeluarkan biaya lebih untuk beralih agar ada berada di tingkat kenyamanan yang sama di jalan. "Ini tentu kita berikan ke masyarakat," kata Syafrin.

Yusa menambahkan, apabila ERP direncanakan untuk diterapkan dalam jangka pendek, ia menyarankan perlu ada regulasi tersendiri bagi operasional kendaraan komersial dan logistik. Hal ini khususnya diperlukan untuk operasional kendaraan komersial dan logistik yang selama ini berada dan beroperasi dalam kawasan atau koridor ERP tetapi tidak menggunakan nomor plat umum.

Ia mengingatkan, apabila penerapan ERP berbasis kawasan atau koridor, mesti dipastikan layanan angkutan umum pada kawasan yang terdampak ERP wajib terpenuhi kuantitas dan kualitas layanannya sesuai dengan kebutuhan kawasan tersebut.

"Pemahaman dan implementasi strategi pemenuhan kebutuhan mobilitas masyarakat melalui angkutan umum sebagai opsi pengganti kendaraan pribadi di kawasan yang terdampak ERP secara tepat adalah hal yang tidak bisa dinegoisasikan," katanya.

Hal tersebut karena besarnya potensi dampak penerapan ERP, baik bagi penghuni kawasan maupun pengunjung kawasan penerapan ERP. (HLN)